

Nomor : B/538/KT.03/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : **Pelaksanaan Penilaian Interview Evaluasi  
SPBE Tahun 2021.**

18 Agustus 2021

Yth.  
**Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE  
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Daftar terlampir)**  
di  
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 yang telah dilakukan oleh 507 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, bersama ini kami sampaikan agenda kegiatan penilaian interview sebagai salah satu tahapan dari kegiatan evaluasi SPBE yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Kementerian PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perlu kami informasikan bahwa kegiatan penilaian interview evaluasi SPBE tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d. 7 September 2021 secara *online* (daring). Untuk itu, demi kelancaran pelaksanaannya, kami mohon perwakilan Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah dibentuk di instansi masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut agar dapat mengikuti agenda kegiatan penilaian interview evaluasi SPBE sesuai dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

**Asisten Deputi Perumusan Kebijakan  
dan Koordinasi Penerapan Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik**



**CAHYONO TRI BIROWO**

**Tembusan**  
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### Kementerian

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Kementerian Sekretaris Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Sosial;
15. Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kementerian Perindustrian;
17. Kementerian Perdagangan;
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Kementerian Perhubungan;
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Kementerian Pertanian;
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

**Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Lembaga Administrasi Negara;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Badan Kepegawaian Negara;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Badan Standardisasi Nasional;
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Badan Pusat Statistik;
16. Badan Informasi Geospasial;
17. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
19. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
20. Badan Narkotika Nasional;
21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Badan Keamanan Laut;
23. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
26. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### Lembaga Negara

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Dewan Perwakilan Daerah;
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Mahkamah Konstitusi;
7. Komisi Yudisial;
8. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
9. Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Badan Inteligen Negara;
11. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
12. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

## **DAFTAR PENERIMA SURAT**

### **Lembaga Non Struktural**

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Kantor Staf Presiden;
2. Dewan Ketahanan Nasional;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Ombudsman Republik Indonesia;
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Komisi Aparatur Sipil Negara;
9. Komisi Penyiaran Indonesia;
10. Komisi Informasi Pusat;
11. Komisi Kejaksaan;
12. Dewan Jaminan Sosial Nasional;
13. Badan Amil Zakat Nasional;
14. Konsil Kedokteran Indonesia;
15. Radio Republik Indonesia;
16. Televisi Republik Indonesia;
17. Dewan Pers;
18. Komisi Pemilihan Umum;
19. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
20. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
21. Lembaga Sensor Film.

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### Provinsi

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Pemerintah Provinsi Jambi
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
7. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
8. Pemerintah Provinsi Bengkulu
9. Pemerintah Provinsi Lampung
10. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
11. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
12. Pemerintah Provinsi Banten
13. Pemerintah D.I. Yogyakarta
14. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
15. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
20. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
21. Pemerintah Provinsi Gorontalo
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
25. Pemerintah Provinsi Bali
26. Pemerintah Provinsi NTB
27. Pemerintah Provinsi NTT
28. Pemerintah Provinsi Maluku
29. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
30. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31. Pemerintah Provinsi Papua Barat
32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
33. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Lampiran I.  
Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
Tanggal: 18 Agustus 2021

## DAFTAR PENERIMA SURAT

### Kabupaten/Kota

Kepada Yth. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
3. Pemerintah Kabupaten Simeulue
4. Pemerintah Kabupaten Bireuen
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
7. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
8. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
9. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
10. Pemerintah Kabupaten Karo
11. Pemerintah Kabupaten Langkat
12. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
14. Pemerintah Kabupaten Dairi
15. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
17. Pemerintah Kabupaten Asahan
18. Pemerintah Kabupaten Toba
19. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
20. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
21. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
22. Pemerintah Kabupaten Samosir
23. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
24. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
25. Pemerintah Kabupaten Batubara
26. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
27. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
28. Pemerintah Kabupaten Kampar
29. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
30. Pemerintah Kabupaten Pelalawan
31. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
32. Pemerintah Kabupaten Siak
33. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
34. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
35. Pemerintah Kabupaten Agam
36. Pemerintah Kabupaten Pasaman
37. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
38. Pemerintah Kabupaten Solok
39. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
40. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

41. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
42. Pemerintah Kabupaten Sijunjung
43. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
44. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
45. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
46. Pemerintah Kabupaten Batang Hari
47. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
48. Pemerintah Kabupaten Bungo
49. Pemerintah Kabupaten Merangin
50. Pemerintah Kabupaten Kerinci
51. Pemerintah Kabupaten Sarolangun
52. Pemerintah Kabupaten Tebo
53. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
54. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
55. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
56. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
57. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
58. Pemerintah Kabupaten Lahat
59. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
60. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
61. Pemerintah Kabupaten Banyuasin
62. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.
63. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
64. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
65. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
66. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
67. Pemerintah Kabupaten Bangka
68. Pemerintah Kabupaten Belitung
69. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
70. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
71. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
72. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
73. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
74. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
75. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
76. Pemerintah Kabupaten Seluma
77. Pemerintah Kabupaten Mukomuko
78. Pemerintah Kabupaten Kepahiang
79. Pemerintah Kabupaten Lebong
80. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
81. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
82. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
83. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
84. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
85. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
86. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
87. Pemerintah Kabupaten Pringsewu
88. Pemerintah Kabupaten Mesuji
89. Pemerintah Kabupaten Bogor
90. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
91. Pemerintah Kabupaten Cianjur



92. Pemerintah Kabupaten Bekasi
93. Pemerintah Kabupaten Karawang
94. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
95. Pemerintah Kabupaten Subang
96. Pemerintah Kabupaten Bandung
97. Pemerintah Kabupaten Sumedang
98. Pemerintah Kabupaten Garut
99. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
100. Pemerintah Kabupaten Ciamis
101. Pemerintah Kabupaten Cirebon
102. Pemerintah Kabupaten Kuningan
103. Pemerintah Kabupaten Indramayu
104. Pemerintah Kabupaten Majalengka
105. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
106. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
107. Pemerintah Kabupaten Serang
108. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
109. Pemerintah Kabupaten Lebak
110. Pemerintah Kabupaten Tangerang
111. Pemerintah Kabupaten Bantul
112. Pemerintah Kabupaten Sleman
113. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
114. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
115. Pemerintah Kabupaten Semarang
116. Pemerintah Kabupaten Kendal
117. Pemerintah Kabupaten Demak
118. Pemerintah Kabupaten Grobogan
119. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
120. Pemerintah Kabupaten Batang
121. Pemerintah Kabupaten Tegal
122. Pemerintah Kabupaten Brebes
123. Pemerintah Kabupaten Pati
124. Pemerintah Kabupaten Kudus
125. Pemerintah Kabupaten Pemalang
126. Pemerintah Kabupaten Jepara
127. Pemerintah Kabupaten Rembang
128. Pemerintah Kabupaten Blora
129. Pemerintah Kabupaten Banyumas
130. Pemerintah Kabupaten Cilacap
131. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
132. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
133. Pemerintah Kabupaten Magelang
134. Pemerintah Kabupaten Temanggung
135. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
136. Pemerintah Kabupaten Purworejo
137. Pemerintah Kabupaten Kebumen
138. Pemerintah Kabupaten Klaten
139. Pemerintah Kabupaten Boyolali
140. Pemerintah Kabupaten Sragen
141. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
142. Pemerintah Kabupaten Karanganyar

143. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
144. Pemerintah Kabupaten Gresik
145. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
146. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
147. Pemerintah Kabupaten Jombang
148. Pemerintah Kabupaten Sampang
149. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
150. Pemerintah Kabupaten Sumenep
151. Pemerintah Kabupaten Bangkalan
152. Pemerintah Kabupaten Bondowoso
153. Pemerintah Kabupaten Situbondo
154. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
155. Pemerintah Kabupaten Jember
156. Pemerintah Kabupaten Malang
157. Pemerintah Kabupaten Pasuruan
158. Pemerintah Kabupaten Probolinggo
159. Pemerintah Kabupaten Lumajang
160. Pemerintah Kabupaten Kediri
161. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
162. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
163. Pemerintah Kabupaten Trenggalek
164. Pemerintah Kabupaten Blitar
165. Pemerintah Kabupaten Madiun
166. Pemerintah Kabupaten Ngawi
167. Pemerintah Kabupaten Magetan
168. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
169. Pemerintah Kabupaten Pacitan
170. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
171. Pemerintah Kabupaten Tuban
172. Pemerintah Kabupaten Lamongan
173. Pemerintah Kabupaten Sambas
174. Pemerintah Kabupaten Sanggau
175. Pemerintah Kabupaten Sintang
176. Pemerintah Kabupaten Mempawah
177. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
178. Pemerintah Kabupaten Ketapang
179. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
180. Pemerintah Kabupaten Landak
181. Pemerintah Kabupaten Sekadau
182. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
183. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
184. Pemerintah Kabupaten Barito Utara
185. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
186. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
187. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
188. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
189. Pemerintah Kabupaten Lamandau
190. Pemerintah Kabupaten Sukamara
191. Pemerintah Kabupaten Katingan
192. Pemerintah Kabupaten Barito Timur
193. Pemerintah Kabupaten Banjar

194. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
195. Pemerintah Kabupaten Tapin
196. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
197. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
198. Pemerintah Kabupaten Tabalong
199. Pemerintah Kabupaten Kotabaru
200. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
201. Pemerintah Kabupaten Balangan
202. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
203. Pemerintah Kabupaten Paser
204. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
205. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
206. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
207. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
208. Pemerintah Kabupaten Minahasa
209. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
210. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
211. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
212. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
213. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
214. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
215. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
216. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
217. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
218. Pemerintah Kabupaten Poso
219. Pemerintah Kabupaten Buol
220. Pemerintah Kabupaten Morowali
221. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
222. Pemerintah Kabupaten Sigi
223. Pemerintah Kabupaten Pinrang
224. Pemerintah Kabupaten Gowa
225. Pemerintah Kabupaten Wajo
226. Pemerintah Kabupaten Bone
227. Pemerintah Kabupaten Maros
228. Pemerintah Kabupaten Luwu
229. Pemerintah Kabupaten Sinjai
230. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
231. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
232. Pemerintah Kabupaten Jeneponto
233. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
234. Pemerintah Kabupaten Barru
235. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
236. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
237. Pemerintah Kabupaten Soppeng
238. Pemerintah Kabupaten Enrekang
239. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
240. Pemerintah Kabupaten Kolaka
241. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
242. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
243. Pemerintah Kabupaten Buton Utara
244. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

245. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
246. Pemerintah Kabupaten Buleleng
247. Pemerintah Kabupaten Jembrana
248. Pemerintah Kabupaten Klungkung
249. Pemerintah Kabupaten Gianyar
250. Pemerintah Kabupaten Karangasem
251. Pemerintah Kabupaten Bangli
252. Pemerintah Kabupaten Badung
253. Pemerintah Kabupaten Tabanan
254. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
255. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
256. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
257. Pemerintah Kabupaten Dompu
258. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
259. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
260. Pemerintah Kabupaten Kupang
261. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
262. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
263. Pemerintah Kabupaten Alor
264. Pemerintah Kabupaten Sikka
265. Pemerintah Kabupaten Flores Timur
266. Pemerintah Kabupaten Ende
267. Pemerintah Kabupaten Manggarai
268. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
269. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
270. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
271. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
272. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
273. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
274. Pemerintah Kabupaten Nagekeo
275. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
276. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
277. Pemerintah Kabupaten Malaka
278. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
279. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
280. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
281. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
282. Pemerintah Kabupaten Keerom
283. Pemerintah Kabupaten Bintan
284. Pemerintah Kabupaten Natuna
285. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
286. Pemerintah Kabupaten Sorong
287. Pemerintah Kabupaten Manokwari
288. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
289. Pemerintah Kabupaten Mamuju
290. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
291. Pemerintah Kabupaten Majene
292. Pemerintah Kabupaten Bulungan
293. Pemerintah Kota Sabang
294. Pemerintah Kota Banda Aceh
295. Pemerintah Kota Langsa

296. Pemerintah Kota Lhokseumawe
297. Pemerintah Kota Subulussalam
298. Pemerintah Kota Medan
299. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
300. Pemerintah Kota Binjai
301. Pemerintah Kota Pematang Siantar
302. Pemerintah Kota Tanjung Balai
303. Pemerintah Kota Sibolga
304. Pemerintah Kota Padangsidempuan
305. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
306. Pemerintah Kota Pekanbaru
307. Pemerintah Kota Dumai
308. Pemerintah Kota Bukittinggi
309. Pemerintah Kota Padang Panjang
310. Pemerintah Kota Sawahlunto
311. Pemerintah Kota Solok
312. Pemerintah Kota Padang
313. Pemerintah Kota Payakumbuh
314. Pemerintah Kota Pariaman
315. Pemerintah Kota Jambi
316. Pemerintah Kota Sungai Penuh
317. Pemerintah Kota Palembang
318. Pemerintah Kota Pagar Alam
319. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
320. Pemerintah Kota Prabumulih
321. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
322. Pemerintah Kota Bengkulu
323. Pemerintah Kota Metro
324. Pemerintah Kota Bandar Lampung
325. Pemerintah Kota Bandung
326. Pemerintah Kota Bogor
327. Pemerintah Kota Sukabumi
328. Pemerintah Kota Cirebon
329. Pemerintah Kota Bekasi
330. Pemerintah Kota Depok
331. Pemerintah Kota Cimahi
332. Pemerintah Kota Tasikmalaya
333. Pemerintah Kota Banjar
334. Pemerintah Kota Tangerang
335. Pemerintah Kota Cilegon
336. Pemerintah Kota Serang
337. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
338. Pemerintah Kota Yogyakarta
339. Pemerintah Kota Semarang
340. Pemerintah Kota Salatiga
341. Pemerintah Kota Pekalongan
342. Pemerintah Kota Tegal
343. Pemerintah Kota Magelang
344. Pemerintah Kota Surakarta
345. Pemerintah Kota Surabaya
346. Pemerintah Kota Mojokerto

347. Pemerintah Kota Malang
348. Pemerintah Kota Pasuruan
349. Pemerintah Kota Probolinggo
350. Pemerintah Kota Blitar
351. Pemerintah Kota Kediri
352. Pemerintah Kota Madiun
353. Pemerintah Kota Batu
354. Pemerintah Kota Pontianak
355. Pemerintah Kota Singkawang
356. Pemerintah Kota Palangka Raya
357. Pemerintah Kota Banjarmasin
358. Pemerintah Kota Banjarbaru
359. Pemerintah Kota Samarinda
360. Pemerintah Kota Balikpapan
361. Pemerintah Kota Bontang
362. Pemerintah Kota Manado
363. Pemerintah Kota Bitung
364. Pemerintah Kota Tomohon
365. Pemerintah Kota KotaMobagu
366. Pemerintah Kota Gorontalo
367. Pemerintah Kota Palu
368. Pemerintah Kota Makassar
369. Pemerintah Kota Parepare
370. Pemerintah Kota Palopo
371. Pemerintah Kota Kendari
372. Pemerintah Kota Baubau
373. Pemerintah Kota Denpasar
374. Pemerintah Kota Mataram
375. Pemerintah Kota Bima
376. Pemerintah Kota Ambon
377. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
378. Pemerintah Kota Jayapura
379. Pemerintah Kota Batam
380. Pemerintah Kota Tanjungpinang
381. Pemerintah Kota Sorong
382. Pemerintah Kota Tarakan

Lampiran II.  
 Nomor: B/ 538 /KT.03/2021  
 Tanggal: 18 Agustus 2021

**Jadwal Pelaksanaan Penilaian Interviu Evaluasi SPBE Tahun 2021**

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Ruang	Responden (K/L/Pemda)
1	2	3	4
Senin, 23 Agustus 2021	Sesi I 08.00 – 10.00	R1	Kab. Pasuruan
		R2	Kab. Blitar
		R3	Kab. Rembang
		R4	Kab. Sragen
		R5	Kab. Labuhanbatu
		R6	Provinsi Sulawesi Selatan
		R7	Kab. Aceh Tamiang
		R8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		R9	Kementerian Ketenagakerjaan
		R10	Kab. Bengkulu Utara
		R11	Kab. Purwakarta
		R12	Kota Depok
	Sesi II 10.00 – 12.00	R1	Kab. Probolinggo
		R2	Kota Probolinggo
R3		Kementerian Dalam Negeri	
R4		Badan Kepegawaian Negara	

		R5	Kab. Tapanuli Selatan
		R6	Kota Bontang
		R7	Kab. Bangka Barat
		R8	Kab. Lamandau
		R9	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		R10	Kab. Muaro Jambi
		R11	Kab. Tasikmalaya
		R12	Kab. Kapuas Hulu
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Bangkalan
		R2	Kab. Bojonegoro
		R3	Kab. Semarang
		R4	Kab. Temanggung
		R5	Provinsi DKI Jakarta
		R6	Kab. Kutai Barat
		R7	Provinsi Aceh
		R8	Kota Pangkal Pinang
		R9	Kab. Sijunjung
		R10	Kab. Jembrana
		R11	Konsil Kedokteran Indonesia



		R12	Kota Pontianak
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Bondowoso
		R2	Kab. Madiun
		R3	Kab. Blora
		R4	Kota Tegal
		R5	Kab. Dairi
		R6	Sekretariat Kabinet
		R7	Kementerian Perhubungan
		R8	Provinsi Kalimantan Tengah
		R9	Kab. Bungo
		R10	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		R11	Pemerintah Kota Dumai
		R12	Dewan Jaminan Sosial Nasional
<b>Selasa, 24 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Mojokerto
		R2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		R3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		R4	Kab. Karanganyar
		R5	Kab. Langkat
		R6	Kab. Pinrang

		R7	Kab. Bangka Tengah
		R8	Kab. Tanah Bumbu
		R9	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		R10	Kab. Badung
		R11	Kab. Mamuju
		R12	Provinsi Kalimantan Barat
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Sidoarjo
		R2	Kab. Tuban
		R3	Kab. Kendal
		R4	Kab. Sukoharjo
		R5	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		R6	Provinsi Kalimantan Timur
		R7	Kab. Nagan Raya
		R8	Kab. Kepulauan Sangihe
		R9	Pemerintah Kota Padang
		R10	Kab. Buton Selatan
		R11	Provinsi Maluku
		R12	Kab. Kayong Utara
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		R2	Badan Intelijen Negara
		R3	Kab. Demak
		R4	Kab. Purworejo
		R5	Kab. Tapanuli Utara
		R6	Kab. Penajam Paser Utara
		R7	Kab. Bener Meriah
		R8	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
		R9	Kota Solok
		R10	Kab. Buleleng
		R11	Kota Pekanbaru

		R12	Badan Amil Zakat Nasional	
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		R2	Pemerintah Kota Surabaya	
		R3	Kab. Cilacap	
		R4	Kab. Wonosobo	
		R5	Kab. Karo	
		R6	Kota Gunung Sitoli	
		R7	Kab. Aceh Timur	
		R8	Mahkamah Konstitusi	
		R9	Kab. Dharmasraya	
		R10	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
		R11	Kab. Majene	
		R12	Kota Tangerang Selatan	
<b>Rabu, 25 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
		R2	Kota Blitar	
		R3	Kab. Pati	
		R4	Badan Tenaga Nuklir Nasional	
		R5	Kementerian Keuangan	
		R6	Kab. Gowa	
		R7	Kab. Aceh Barat	
		R8	Kota Bitung	
		R9	Kota Padang Panjang	
		R10	Kab. Buton Utara	
		R11	Kab. Indragiri Hulu	
		R12	Kab. Ketapang	
		<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Kediri
			R2	Kab. Tulungagung
			R3	Kab. Grobogan
			R4	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
			R5	Kementerian Pertanian
			R6	Kab. Mahakam Ulu
			R7	Pemerintah Kota Subulussalam
			R8	Kab. Barito Kuala
			R9	Kab. Kerinci
			R10	Kab. Tabanan
			R11	Kab. Polewali Mandar
			R12	Kab. Bengkayang

	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Lumajang
		R2	Kab. Ngawi
		R3	Kementerian Luar Negeri
		R4	Kab. Wonogiri
		R5	Kab. Humbang Hasundutan
		R6	Kab. Bantaeng
		R7	Provinsi Kep. Bangka Belitung
		R8	Kota Banjarbaru
		R9	Kab. Sarolangun
		R10	Kab. Klungkung
		R11	Kab. Rokan Hulu
		R12	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Banyuwangi
		R2	Kab. Magetan
		R3	Kab. Kudus
		R4	Kota Semarang
		R5	Kab. Batubara
		R6	Komisi Pemilihan Umum
		R7	Kota Batam
		R8	Komisi Yudisial
		R9	Kota Pariaman
		R10	Badan Pengawas Pemilihan Umum
		R11	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
		R12	Kab. Sambas
<b>Kamis, 26 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Situbondo
		R2	Kab. Lamongan
		R3	Kab. Banyumas
		R4	Kab. Kebumen
		R5	Perpustakaan Nasional RI
		R6	Provinsi Maluku Utara
		R7	Kota Kotamobagu
		R8	Kab. Bolaang Mongondow
		R9	Provinsi Jambi
		R10	Kota Denpasar
		R11	Kab. Pelalawan

		R12	Kab. Landak
<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Sampang	
	R2	Kota Mojokerto	
	R3	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	
	R4	Kab. Klaten	
	R5	Kota Pematang Siantar	
	R6	Kab. Halmahera Utara	
	R7	Kab. Biak Numfor	
	R8	Kab. Balangan	
	R9	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	
	R10	Kab. Gianyar	
	R11	Kab. Seram Bagian Barat	
	R12	Kota Singkawang	
<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Jombang	
	R2	Kab. Pacitan	
	R3	Badan Pusat Statistik	
	R4	Kab. Purbalingga	
	R5	Kab. Labuhanbatu Selatan	
	R6	Kab. Jenepono	
	R7	Kota Tanjungpinang	
	R8	Kota Manado	
	R9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
	R10	Kota Kendari	
	R11	Kantor Staf Presiden	
R12	Kab. Sanggau		
<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
	R2	Kab. Nganjuk	
	R3	Kab. Jepara	
	R4	Kab. Banjarnegara	
	R5	Kab. Mandailing Natal	

		R6	Badan Narkotika Nasional
		R7	Dewan Perwakilan Daerah
		R8	Komisi Pemberantasan Korupsi
		R9	Kota Bukittinggi
		R10	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
		R11	Kab. Siak
		R12	Lembaga Sensor Film
<b>Jumat, 27 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Jember
		R2	Kota Malang
		R3	Kab. Pekalongan
		R4	Provinsi Kalimantan Utara
		R5	Kota Tanjung Balai
		R6	Kab. Soppeng
		R7	Kab. Jayawijaya
		R8	Kab. Kepulauan Talaud
		R9	Kab Pasaman Barat
		R10	Kab. Buton Tengah
		R11	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		R12	Kab. Sintang
	<b>Sesi II</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Gresik
		R2	Kab. Ponorogo
		R3	Provinsi Jawa Tengah
		R4	Kota Bima
		R5	Kota Sibolga
		R6	Kab. Enrekang
		R7	Provinsi Kepulauan Riau
		R8	Kab. Minahasa Utara
		R9	Kab. Merangin
		R10	Kota Baubau
		R11	Kab. Kuantan Singingi
		R12	Kab. Mempawah
<b>Sesi III</b>	R1	Kab. Pamekasan	
	R2	Kab. Trenggalek	

	15.00 – 17.00		
		R3	Kab. Pemalang
		R4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
		R5	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		R6	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		R7	Badan Keamanan Laut
		R8	Kota Banjarmasin
		R9	Kab. Tanjung Jabung Barat
		R10	Kab. Bangli
		R11	Kab. Kepulauan Meranti
		R12	Kota Cilegon
		<b>Senin, 30 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00
R2	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
R3	Kab. Batang		
R4	Provinsi Papua Barat		
R5	Kab. Pakpak Bharat		
R6	Kab. Barru		
R7	Kab. Keerom		
R8	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
R9	Kab. Batang Hari		
R10	Kab. Konawe Selatan		
R11	Kota Ambon		
R12	Kab. Kubu Raya		
<b>Sesi II</b> 10.00 - 12.00	R1		Provinsi Jawa Timur
	R2		Kab. Manggarai Timur
	R3		Kab. Sigi
	R4		Kab. Lombok Tengah
	R5		Kota Padangsidimpuan
	R6		Kota Tidore Kepulauan
	R7		Kota Jayapura
	R8		Kab. Kotabaru
	R9		Kota Payakumbuh
R10	Provinsi Bali		
R11	Provinsi Sulawesi Barat		

		R12	Kab. Sekadau
	<b>Sesi III</b> 13.00 - 15.00	R1	Kab. Sumenep
		R2	Kab. Kupang
		R3	Arsip Nasional Republik Indonesia
		R4	Badan Koordinasi Penanaman Modal
		R5	Kab. Labuhanbatu Utara
		R6	Kota Makassar
		R7	Kab. Natuna
		R8	Provinsi Sulawesi Utara
		R9	Kota Sawahlunto
		R10	Kab. Karangasem
		R11	Provinsi Riau
		R12	Kota Serang
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Lampung Utara
		R2	DPR
		R3	Kota Surakarta
		R4	Kab. Bulungan
		R5	Kab. Samosir
		R6	Kab. Kepulauan Selayar
		R7	Kab. Kepulauan Anambas
		R8	Kab. Minahasa Tenggara
		R9	Kab. Solok Selatan
		R10	Kab. Kolaka Utara
		R11	Kab. Kampar
		R12	Kab. Ogan Komering Ulu



<b>Selasa, 31 Agustus 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Sabu Raijua
		R2	Kab. Manggarai Barat
		R3	Kab. Poso
		R4	Kab. Sumbawa
		R5	Badan Standardisasi Nasional
		R6	Kab. Luwu
		R7	Kota Tomohon
		R8	Kab. Tabalong
		R9	Kota Bengkulu
		R10	Kab. Bogor
		R11	Kota Cimahi
		R12	Kota Prabumulih
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Sumba Tengah
		R2	Kab. Ende
		R3	Provinsi Sulawesi Tengah
		R4	Kota Tarakan
		R5	Kota Medan
		R6	Kab. Luwu Utara
		R7	Kab. Bintan

		R8	Kab. Minahasa
		R9	Ombudsman Republik Indonesia
		R10	Kab. Kuningan
		R11	Kota Tasikmalaya
		R12	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Mesuji
		R2	Kab. Flores Timur
		R3	Provinsi Gorontalo
		R4	Kab. Sumbawa Barat
		R5	Kota Tebing Tinggi
		R6	Kab. Sinjai
		R7	Kab. Barito Selatan
		R8	Kab. Gunungkidul
		R9	Kab. Tanjung Jabung Timur
		R10	Kab. Cirebon
		R11	Kementerian Sekretariat Negara
		R12	Kab. Ogan Ilir
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Badan Pemeriksa Keuangan
		R2	MPR

		R3	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		R4	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
		R5	Kab. Padang Lawas Utara
		R6	Kota Palopo
		R7	Kab. Pulang Pisau
		R8	Kab. Padang Pariaman
		R9	Kota Jambi
		R10	Kab. Sukabumi
		R11	Kab. Tangerang
		R12	Kota Lubuk Linggau
<b>Rabu, 1 September 2021</b>	<b>Sesi I 08.00 – 10.00</b>	R1	Dewan Ketahanan Nasional
		R2	Kab. Manggarai
		R3	Kota Palu
		R4	Kab. Manokwari
		R5	Kab. Asahan
		R6	Kab. Sidenreng Rappang
		R7	Kab. Tanah Laut
		R8	Kab. Pesisir Selatan
		R9	Kab. Rejang Lebong

		R10	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		R11	Kab. Lebak
		R12	Kab. Muara Enim
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Pringsewu
		R2	Kab. Sumba Timur
		R3	Kab. Buol
		R4	Kab. Sorong
		R5	Kota Binjai
		R6	Kab. Bulukumba
		R7	Kab. Tapin
		R8	Kab. Kulon Progo
		R9	Provinsi Sulawesi Tenggara
		R10	Kementerian Perdagangan
		R11	Kota Bogor
		R12	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Lampung Barat
		R2	Kab. Timor Tengah Utara
		R3	Kab. Morowali
		R4	Kab. Dompu

		R5	Kab. Serdang Bedagai
		R6	Kota Parepare
		R7	Kab. Sukamara
		R8	Kementerian Agama
		R9	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
		R10	Kab. Subang
		R11	Kota Bandung
		R12	Komisi Penyiaran Indonesia
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kota Metro
		R2	Kota Kediri
		R3	Badan Informasi Geospasial
		R4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		R5	Kab. Toba
		R6	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
		R7	Kementerian Kesehatan
		R8	Kab. Tanah Datar
		R9	Kab. Seluma
		R10	Kab. Bandung
		R11	Komisi Informasi Pusat

		R12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
<b>Kamis, 2 September 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Way K
		R2	Kab. Sumba Barat Daya
		R3	Kab. Bone Bolango
		R4	Kab. Manokwari Selatan
		R5	Kota Samarinda
		R6	Kab. Bangka
		R7	Kab. Barito Utara
		R8	Kab. Agam
		R9	Televisi Republik Indonesia
		R10	Kab. Indramayu
		R11	Kota Sukabumi
		R12	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
	<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00	R1	Kab. Malaka
		R2	Kab. Timor Tengah Selatan
		R3	Kab. Gorontalo
		R4	Kota Sorong
		R5	Kab. Bone
		R6	Kota Banda Aceh

		R7	Kab. Katingan
		R8	Kab. Pasaman
		R9	Kab. Kepahiang
		R10	Kab. Majalengka
		R11	Kota Cirebon
		R12	Kab. Empat Lawang
	<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00	R1	Provinsi Lampung
		R2	Mahkamah Agung RI
		R3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		R4	Kota Mataram
		R5	Kab. Kutai Kartanegara
		R6	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
		R7	Kab. Kotawaringin Timur
		R8	Provinsi D.I. Yogyakarta
		R9	Kab. Kolaka
		R10	Kementerian Perindustrian
		R11	Komisi Kejaksaan
		R12	Kab. Musi Rawas Utara
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Badan Siber dan Sandi Negara

		R2	Kota Madiun
		R3	Kota Magelang
		R4	Kab. Lombok Utara
		R5	Lembaga Ketahanan Nasional RI
		R6	Kab. Bireuen
		R7	Kab. Belitung Timur
		R8	Kab. Bantul
		R9	Provinsi Bengkulu
		R10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		R11	Provinsi Banten
		R12	Kab. Lahat
<b>Jumat, 3 September 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kota Bandar Lampung
		R2	Kab. Sikka
		R3	Kab. Banggai Kepulauan
		R4	Provinsi Nusa Tenggara Barat
		R5	Kab. Wajo
		R6	Kota Sabang
		R7	Kab. Hulu Sungai Tengah
		R8	Kab. Limapuluh Kota
		R9	Kota Sungai Penuh



		R10	Kab. Sumedang
		R11	Kota Banjar
		R12	Kab. Musi Rawas
	<b>Sesi II</b> 13.00 – 15.00	R1	Kab. Tanggamus
		R2	Kab. Sumba Barat
		R3	Kota Gorontalo
		R4	Kab. Lombok Barat
		R5	Kab. Paser
		R6	Kab. Belitung
		R7	Kota Palangka Raya
		R8	Kab. Solok
		R9	Radio Republik Indonesia
		R10	Kab. Garut
		R11	Komisi Aparatur Sipil Negara
		R12	Dewan Pers
<b>Sesi III</b> 15.00 – 17.00	R1	Kab. Tulang Bawang Barat	
	R2	Kota Batu	
	R3	Kab. Boyolali	
	R4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

		R5	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		R6	Kab. Simeulue
		R7	Kab. Bangka Selatan
		R8	Kementerian Sosial
		R9	Kab. Mukomuko
		R10	Kab. Cianjur
		R11	Kota Tangerang
		R12	Kota Palembang
<b>Senin, 6 September 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R1	Kab. Nagekeo
		R2	Kab. Alor
		R3	Kota Pekalongan
		R4	Kementerian Pertahanan
		R5	Kota Balikpapan
		R6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		R7	Kab. Kotawaringin Barat
		R8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		R9	Kab. Lebong
		R10	Kab. Bekasi
		R11	Kota Bekasi

		R12	Pemerintah Kota Pagar Alam
<b>Sesi II</b> 10.00 – 12.00		R1	Kab. Lampung Tengah
		R2	Kab. Rote Ndao
		R3	Kab. Magelang
		R4	Provinsi Sumatera Utara
		R5	Kab. Maros
		R6	Kota Langsa
		R7	Kab. Barito Timur
		R8	Kota Yogyakarta
		R9	Kab. Bengkulu Selatan
		R10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		R11	Kab. Pandeglang
		R12	Kab. Ogan Komering Ilir
<b>Sesi III</b> 13.00 – 15.00		R1	Kota Pasuruan
		R2	Kab. Tegal
		R3	Lembaga Administrasi Negara
		R4	Kab. Deli Serdang
		R5	Kab. Kutai Timur
		R6	Kota Lhokseumawe

		R7	Provinsi Kalimantan Selatan
		R8	Provinsi Sumatera Barat
		R9	Kab. Tebo
		R10	Kab. Ciamis
		R11	Kab. Serang
		R12	Kab. Banyuasin
	<b>Sesi IV</b> 15.00 – 17.00	R1	Kejaksaan Agung
		R2	Kab. Brebes
		R3	Kota Salatiga
		R4	Kab. Tapanuli Tengah
		R5	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		R6	Kab. Aceh Singkil
R7		Kab. Banjar	
R8		Kab. Sleman	
R9		Kab. Bengkulu Tengah	
R10		Kab. Karawang	
R11		Kab. Pangandaran	
R12		Provinsi Sumatera Selatan	
<b>Selasa, 7 September 2021</b>	<b>Sesi I</b> 08.00 – 10.00	R10	Provinsi Jawa Barat

		R11	Kab. Bandung Barat
		R12	Kab. Musi Banyuasin

Lampiran III.

Nomor: B/ 538 /KT.03/2021

Tanggal: 18 Agustus 2021

### **Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2021**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian interview, setiap perwakilan K/L/D diwajibkan mengisi konfirmasi kehadiran melalui <https://konfirmasi.menpan.go.id/event/240> (paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan dimulai tanggal 23 Agustus 2021).
2. Kegiatan Penilaian Interview Evaluasi SPBE Tahun 2021 akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi video conference (Zoom). ID Meeting dan Password akan dikirimkan melalui narahubung yang terdaftar pada konfirmasi tersebut.
3. Untuk memudahkan identifikasi dan alokasi sesuai ruangnya, Perwakilan K/L/Pemda wajib mengikuti ketentuan penamaan pada identitas zoomnya sebagai berikut:  
Kode Ruang – Nama Instansi – Nama Perwakilan (*contoh: R2–K.PANRB–Bella*)
4. Jika diperlukan, Perwakilan K/L/Pemda dapat masuk ke ruang Zoom menggunakan **maksimal 10 (sepuluh) akun** dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan dan tata tertib dalam pelaksanaan penilaian interview agar kegiatan dapat berjalan efektif dan kondusif.
5. Alokasi waktu penilaian interview **maksimal 2 (dua) jam** untuk masing-masing K/L/Pemda, sehingga diharapkan Perwakilan K/L/Pemda diharapkan sudah memasuki ruang *virtual meeting* (Zoom) 15 (lima belas) menit sebelum jadwal masing-masing K/L/Pemda untuk memastikan pelaksanaan penilaian interview dapat berjalan tepat waktu.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian interview ini, akan dilakukan klarifikasi dan validasi lebih lanjut oleh Asesor Eksternal Kementerian PANRB terhadap bukti dukung yang telah disampaikan oleh K/L/Pemda melalui Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai hasil Penilaian Mandiri. Untuk itu, masing-masing perwakilan K/L/Pemda diharapkan sudah mempersiapkan seluruh bukti dukung dalam bentuk *softcopy* yang dapat diperlihatkan melalui fitur *share screen* pada Zoom masing-masing.
7. Dalam hal perlu menambahkan data dukung pada masing-masing indikator setelah mendapatkan persetujuan Asesor Eksternal, perwakilan K/L/D dapat mengunggah bukti dukung tambahan tersebut pada fitur aplikasi <https://monev.spbe.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama seperti kegiatan Penilaian Mandiri SPBE, dengan ketentuan batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Asesor Eksternal.
8. Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan K/L/D dapat menghubungi:
  - a) **Tim Teknis Evaluasi SPBE** pada Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE di nomor **021 7398381 – 89 ext 2111**,
  - b) **Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota**  
Narahubung (**Nugroho Arief - 0822-4919-0828**),
  - c) **Pemerintah Kabupaten Jawa, Kalimantan, Papua, Papua Barat**  
Narahubung (**Joshua Ariel - 0856-5101-5615**),
  - d) **Pemerintah Kabupaten Sumatera**  
Narahubung (**Bella Kirana - 0895-3602-81347**),
  - e) **Pemerintah Kabupaten Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara**  
Narahubung (**Muthia N - 0857-7310-1473**).